

**MANAJEMEN KONFLIK ANTARA WARGA RELOKASI PASCA GEMPA
DENGAN WARGA KAMPUNG PASIR SEMBUNG
DI KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT**

Nabila Halimatul Rahmawati

NPP. 31.0377

Asdaf Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 31.0377@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP., M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research analyzes the conflict management applied by the Sirnagalih Village Government in managing conflicts between relocated residents and local residents over scavenging areas at Pasir Sembung Landfill. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze the conflict management carried out by the Sirnagalih Village Government, find out the supporting factors and inhibiting factors in conflict management and describe the preventive efforts applied. **Method:** Based on Conflict Management Theory by Siti Asiah Tjabolo (2017), The research used descriptive qualitative methods with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. **Result:** The results showed that the Sirnagalih Village Government has made conflict management efforts quite optimally. Handling still focuses on closing the conflict site and economic improvement programs for relocated residents. Meanwhile, efforts to reconcile and restore relations with local residents are still limited. Supporting factors in conflict management include the motivation of relocated residents to improve their economy and the existence of vacant land owned by the village. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of attention to the interests of local residents and the lack of an active role from the Sub-district. Preventive efforts have been made such as landfill closure, food security programs, and livestock cultivation. **Conclusion:** The steps taken have been in line with conflict management procedures, although there are gaps in terms of implementation, support to local residents, and contributions from the sub-district.*

Keywords: Conflict, Conflict Management and Sirnagalih Residents

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini mengkaji manajemen konflik yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sirnagalih dalam mengatasi konflik antara warga relokasi dengan warga sekitar terkait perebutan wilayah memulung di TPA Pasir Sembung. **Tujuan:** Tujuan daripada penelitian ini untuk menganalisis manajemen konflik yang dilakukan Pemerintah Desa Sirnagalih. **Metode:** Mengacu pada teori Manajemen Konflik oleh Siti Asiah Tjabolo (2017), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Sirnagalih telah melakukan upaya manajemen konflik dengan cukup optimal. Akan tetapi penanganan masih berfokus pada penutupan lokasi konflik dan program peningkatan ekonomi warga relokasi.

Sementara itu, upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan dengan warga sekitar masih terbatas. Faktor pendukung dalam manajemen konflik meliputi motivasi warga relokasi untuk meningkatkan perekonomian dan adanya lahan kosong milik Desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian pada kepentingan warga sekitar dan minimnya peran aktif dari Kecamatan. Upaya preventif telah dilakukan seperti penutupan TPA, program ketahanan pangan, dan budidaya ternak. **Kesimpulan:** Langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan prosedur manajemen konflik, meski terdapat kekurangan dalam hal implementasi, dukungan kepada warga sekitar, serta kontribusi dari Kecamatan.

Kata Kunci: Konflik, Manajemen Konflik dan Warga Desa Sirnagalih

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik seringkali terjadi pada kehidupan bermasyarakat, bisa terjadi karena perbedaan kepentingan, perebutan kepentingan dan lain sebagainya. Konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama, atau menjalankan kegiatan bersama-sama, atau mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda (Ranupandojo & Husnan, 2016).

Kehidupan selalu diwarnai dengan konflik, baik itu konflik antar individu, individu dengan kelompok, maupun konflik antar kelompok. Begitu pula dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, konflik tak jarang terjadi antara lembaga pemerintah, konflik antara warga dengan pemerintah bahkan antar warga, seperti konflik yang terjadi antara warga relokasi pasca gempa Cianjur dengan warga Kampung Pasir Sembung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Cianjur mengalami bencana alam gempa bumi pada tanggal 21 November 2022 yang memiliki Magnitudo 5.6. Terdapat 12 kecamatan dari total 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi. Pusat gempa terletak di Kecamatan Cugenang yang memiliki jarak tujuh kilometer dari Kantor Bupati Cianjur.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan via telepon dengan perangkat Desa Sirnagalih pada tanggal 17 November 2023 bahwa 636 orang warga akan direlokasikan ke Desa Sirnagalih menempati rumah relokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah. Data yang diberikan oleh perangkat Desa Sirnagalih berisi bahwa 636 warga tersebut terbagi dalam 200 KK (Kepala Keluarga). Pengungsi gempa yang direlokasikan ke Desa Sirnagalih sudah mendapatkan kunci rumah dan perlahan mulai dihuni. Rumah relokasi berupa Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Sebagian besar mata pencaharian warga di Cugenang adalah buruh tani, petani dan pekebun. Akibat gempa tersebut lahan mereka belum dapat digunakan sehingga warga tidak memiliki mata pencaharian yang tetap.

Wilayah relokasi bagi korban gempa dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Pasir Sembung. TPA Pasir Sembung sudah beroperasi sejak tahun 1975 dengan pengolahan sampah menggunakan sistem *open dumping* sampai tahun 2006 (Aditama & Burhanuddin, 2022). Jarak antara TPS Pasir Sembung dengan tempat relokasi yaitu 200 meter (Ashri, 2022). Sebagian penduduk disana memanfaatkan keberadaan TPA Pasir Sembung untuk memulung barang-barang bekas yang dapat dijual atau bahkan digunakan kembali. Hal itu diikuti oleh warga relokasi karena belum memiliki pekerjaan yang tetap.

Persaingan merebutkan wilayah untuk memulung di TPS Pasir Sembung juga bukan hanya antara warga setempat dengan warga relokasi yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga dengan orang-orang luar Kampung Pasir Sembung yang juga memulung di TPS tersebut. Selanjutnya, perebutan wilayah di TPAS Pasir Sembung antara warga Kampung Pasir Sembung dengan warga relokasi menimbulkan adanya hubungan yang tidak harmonis atau disharmoni sehingga memunculkan adanya konflik diantara kedua pihak tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Akibat dari banyaknya warga yang memulung sehingga menimbulkan adanya perebutan lahan dalam mencari barang-barang bekas menyebabkan penghasilan dari warga Kampung Pasir Sembung cenderung menurun. Karena wilayahnya pun terbagi dengan warga relokasi. Keterbatasan sumber mata pencaharian menyebabkan adanya perebutan wilayah. Kemudian konflik semakin menjadi karena berkurangnya pendapatan dari warga. Karena mau tidak mau, untuk sekedar biaya sehari-hari beberapa warga relokasi memilih untuk memulung barang-barang bekas di TPA Pasir Sembung. Jika keadaan tersebut dibiarkan terus-menerus dan tidak ada penyelesaiannya. Hal itu dapat memperparah situasi dan menimbulkan masalah yang lebih besar, dibutuhkan peran dari Pemerintah Kabupaten Cianjur terutama Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, Kecamatan Cilaku, Pemerintah Desa Sirnagalih dan warga Sirnagalih sendiri dalam penyelesaian konflik dan melakukan tindakan preventif agar tidak menimbulkan permasalahan kembali.

1.3 Penelitian Terdahulu

Indikator yang Peneliti gunakan untuk menentukan penelitian yang paling relevan dimulai dari tahun terbit, dengan tahun terbit Peneliti membatasi penelitian terdahulu dengan jenjang waktu lima tahun terakhir atau dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Indikator kedua yang dipakai oleh Peneliti yaitu penelitian terdahulu yang memfokuskan pada penyelesaian konflik dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Indikator yang ketiga adalah penyelesaian konflik dan perencanaan tindakan pencegahan. Hal ini Peneliti mencantumkan empat hasil penelitian terdahulu sebagai berikut yakni Dorcas Langgar dalam penelitiannya pada tahun 2023 berjudul “Dinamika Interaksi, Potensi Konflik dan Keharmonisan Hubungan Antar Masyarakat Eks Timor-Timur dan Masyarakat Lokal di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang”, menunjukkan bahwa interaksi antara pengungsi eks Timtim dengan warga lokal berjalan baik. Tetapi pada sebelumnya ditemukan konflik-konflik seperti pertentangan dan perilaku anarkis. Masyarakat akhirnya beradaptasi juga adanya peran dari tokoh masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix method* (Langgar, 2023). Menurut I Gede Putu Suarjana, Putu Indra Christiawam dan A Sediyo Adi Nugraha (2020). Dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Agung di Desa Ban, adanya kerjasama yang kompak antara para pengungsi seperti gotong royong membersihkan posko pengungsian. Namun, konflik akibat kesalahpahaman antara pengungsi dengan warga lokal kadang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif (Suarjana et al., 2020). Kemudian skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi” yang ditulis oleh Nur Samsiar pada tahun 2023. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, pada penelitian tersebut bahwa peran pemerintah dalam mengatasi konflik antar Desa Pesaku dan Desa Rarampadende yaitu dengan mendamaikan kedua desa serta bertindak lanjut ke pihak yang berwajib (Samsiar, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Konteks penelitian yang dilakukan yakni penyelesaian konflik antar warga relokasi dengan warga Kampung Pasir Sembung oleh Pemerintah Desa Sirnagalih melalui proses manajemen konflik. Lebih lanjut, teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen Konflik oleh Tjabolo (2017), yang mana terdiri dari beberapa dimensi antara lain Perencanaan (Identifikasi Masalah, Klasifikasi Masalah dan Analisis Masalah), Pelaksanaan (Penentuan Metode dan Penyelesaian Masalah) dan Evaluasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah setempat dalam penyelesaian konflik di Desa Sirnagalih. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya pencegahan yang dilakukan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2022). Sifat dalam penelitian kualitatif lebih kearah deskriptif, dimana bentuk dari data yang terkumpul berupa kata-kata dan gambar serta tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2013). Juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Sahir bahwa metode penelitian deskriptif bersifat menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti sistematis (Sahir, 2022). Penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik wawancara yang digunakan berupa semistruktur dengan mengambil sampel. Sampel yang digunakan terdiri dari dua teknik yaitu *purposive sampling* dan *incidental sampling*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan oleh Penulis pada proses manajemen konflik Pemerintah Desa Sirnagalih dalam menyelesaikan konflik antara warga relokasi dengan warga sekitar mengacu pada teori Manajemen Konflik dari Tjabolo (2017) yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu Perencanaan yang terdiri dari Identifikasi Masalah, Klasifikasi Masalah dan Analisis Masalah. Kemudian Pelaksanaan terdiri atas Penentuan Metode dan Penyelesaian Masalah serta Evaluasi. Lebih lanjut dijabarkan pada subbab berikut:

3.1 Perencanaan

Proses perencanaan berupa menganalisis bagaimana rencana manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemdes Sirnagalih sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Tahap perencanaan terdiri dari tiga bagian:

a. Identifikasi Masalah

Gejala yang timbul dalam konflik yang terjadi ialah penolakan sebelumnya dari warga pasca gempa yang menolak untuk dipindahkan ke Desa Sirnagalih dikarenakan lokasi perumahan relokasi yang dekat dengan TPA Pasir Sembung. Kemudian hilangnya pekerjaan tetap beberapa warga relokasi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan. Gejala juga timbul karena protes warga relokasi karena kekurangan air bersih dikarenakan hanya menggunakan sumur bor satu untuk semua rumah dan belum diambil alih oleh PDAM. Berdasarkan uraian di atas, gejala-gejala

tersebut bermuara pada satu permasalahan yaitu kurangnya pendapatan bagi beberapa warga relokasi yang kemudian mengakibatkan timbulnya konflik.

b. Klasifikasi Masalah

Konflik yang terjadi ialah konflik disfungsional dimana menurut Robbins konflik disfungsional adalah konflik yang merintangai pencapaian tujuan kelompok (Robbins, 2009). Dikatakan konflik disfungsional karena konflik tersebut menghambat warga dalam mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatannya.

c. Analisis Masalah

Konflik antara warga tersebut harus segera diselesaikan karena apabila dibiarkan takutnya menjadikan konflik semakin membesar dan meluas. Kemudian, setelah melakukan pengamatan terhadap masalah yang terjadi bahwa permasalahan tersebut ditangani oleh Pemerintah, terutama oleh Pemerintah Desa Sirnagalih selaku unsur pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dan dapat bertatap muka langsung.

3.2 Pelaksanaan

a. Penentuan Metode

Tjabolo berpendapat bahwa cara penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu dominasi dengan membujuk atau *smoothing* dan akomodasi. Dominasi atau penekanan dengan membujuk adalah salah satu cara penekanan yang lebih *diplomatic*. Sedangkan akomodasi dalam pandangan Tjabolo (Tjabolo, 2017) adalah bentuk penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri, proses tersebut ialah taktik perdamaian.

b. Penyelesaian Masalah

Terdapat beberapa langkah yang digunakan oleh Pemdes Sirnagalih dalam proses manajemen konflik diantaranya ialah penutupan TPA Pasir Sembung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Januari 2024 dikarenakan *overload*. Akibat dari ditutupnya TPA Pasir Sembung juga menurunkan intensitas konflik yang terjadi antara warga relokasi dengan warga Kampung Pasir Sembung khususnya para pemulung dikedunya. Selain itu, sebagai unsur pemerintahan yang melekat langsung pada masyarakat, Pemerintah Desa Sirnagalih tidak tinggal diam saat adanya relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak gempa bumi. Untuk menggerakkan perekonomian warga relokasi yang sebagian besar bekerja disektor agraris, pemerintah Desa Sirnagalih menyiapkan program ketahanan pangan yang merupakan salah satu program Desa Sirnagalih. Lebih lanjut terdapat program budidaya ikan lele yang diberikan oleh kelompok mahasiswa program Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dari Universitas Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 18-20 Januari 2023 bertempat di Perumahan BSD, program tersebut berupa kegiatan dan pelatihan budidaya ikan lele dengan metode bioflok sebagai bagian dari Proyek Kemanusiaan Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Cianjur. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh Pemdes Sirnagalih dalam menyelesaikan konflik antar warga tersebut.

3.3 Evaluasi

Manajemen konflik yang berhasil akan meningkatkan kinerja baik individu maupun kelompok yang ditunjukkan dalam perilaku kerja dan hasil kerja (Tjabolo, 2017). Dalam bukunya, Tjabolo menjelaskan bahwa “Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses manajemen konflik. Dengan mengetahui pencapaian pelaksanaan manajemen konflik yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan evaluasi merupakan langkah yang kritis (*critical*) karena sebagai landasan untuk melakukan koreksi ataupun pementapan pada langkah-langkah sebelumnya”.

Dalam penyelesaian konflik antara warga relokasi dengan warga Kampung Pasir Sembung tetap memiliki kemungkinan kurang efektif atau gagal terlebih langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sirnagalih terkesan berat sebelah yaitu berfokus pada warga relokasi, tetapi tidak dengan pemulung warga Kampung Pasir Sembung.

Adapun faktor pendukung yang didapati Pemdes Sirnagalih dalam melakukan manajemen konflik yaitu antara lain:

a. Motivasi warga relokasi untuk meningkatkan perekonomian

Motivasi-motivasi yang muncul dari warga relokasi untuk meningkatkan taraf hidup serta tidak kembali ikut memulung di TPA Pasir Sembung menjadikan salah satu faktor pendukung dalam manajemen konflik pada kasus ini. Contohnya seperti adanya keinginan warga relokasi untuk membentuk kelompok tani, juga berharap adanya bantuan mesin jahit karena beberapa warga juga bekerja dibidang konveksi. Serta warga yang kembali menggarap lahan di tempat sebelumnya walaupun dengan ada ongkos tambahan dikarenakan jarak yang jauh.

b. Lahan kosong milik Pemerintah Desa Sirnagalih

Adanya lahan kosong milik Pemerintah Desa Sirnagalih di belakang Perumahan BSD yang kemudian digunakan sebagai wadah program Ketahanan Pangan Desa Sirnagalih. Lahan tersebut pada akhirnya digunakan oleh beberapa warga relokasi baik yang pernah menjadi pemulung di TPA Pasir Sembung maupun yang tidak.

Berbeda dengan hal itu, sementara faktor penghambat yang dialami oleh Pemdes Sirnagalih berupa tidak adanya kontribusi yang diberikan kepada pemulung warga Kp. Pasir Sembung. Lebih lanjut tidak adanya peran aktif dari Kecamatan setempat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Kemudian, beberapa upaya yang dilakukan Pemdes Sirnagalih yang mana selain sebagai bentuk penyelesaian juga bentuk tindakan preventif yaitu penutupan TPA Pasir Sembung, secara tidak langsung, ditutupnya TPA Pasir Sembung menjadikan tidak ada tempat bagi warga relokasi maupun pemulung untuk merebut wilayah dalam mengumpulkan barang-barang bekas. Program ketahanan pangan dapat menjadi tindakan pencegahan agar tidak kembali memulung yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi warga relokasi terlebih bagi yang kehilangan mata pencaharian. Juga program budidaya ikan lele yang diselenggarakan oleh Kelompok Mahasiswa asal Universitas Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu bentuk pencegahan agar permasalahan tidak terulang kembali.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Upaya penyelesaian masalah oleh Pemdes Sirnagalih dengan proses manajemen konflik merupakan bentuk kewenangan Pemerintah Desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penulis menemukan bahwa pemerintah desa melakukan upaya penyelesaian dengan meningkatkan perekonomian warga relokasi tetapi tidak memberikan aksi kepada warga lainnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Samsiar bahwa penyelesaian masalah dengan cara mendamaikan kedua desa serta menindaklanjuti ke pihak yang berwajib (Samsiar, 2023).

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang menjadi rintangan bagi Pemdes Sirnagalih dalam manajemen konflik. Hambatan tersebut diantaranya tidak adanya solusi yang diberikan Pemdes kepada pemulung warga Kp. Pasir Sembung yang mana hanya berfokus pada pemulihan ekonomi warga relokasi. Kemudian tidak adanya peran aktif dari pihak Kecamatan yang mana peran dari tingkat Pemerintah yang lebih tinggi sangat diperlukan untuk memperkuat upaya penyelesaian konflik dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan.

IV. KESIMPULAN

Manajemen konflik antara warga relokasi pasca gempa dengan warga Kampung Pasir Sembung bisa dikatakan sudah berjalan cukup optimal. Hal ini terlihat dari dua dari tiga dimensi, dan lima dari enam indikator sudah berjalan baik. Kecuali pada dimensi pelaksanaan dimana salah satu indikatornya yaitu penyelesaian masalah, yang mana Pemdes Sirnagalih kurang melibatkan warga Kp. Pasir Sembung didalamnya. Serta dukungan dari pihak Kecamatan dalam proses manajemen konflik masih terbatas.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu permasalahan di masyarakat yang terkena dampak panjang dari sebuah bencana alam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan proses manajemen konflik di Desa Sirnagalih untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Sirnagalih beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T., & Burhanuddin, H. (2022). Studi Penentuan Lokasi Alternatif Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Di Kabupaten Cianjur. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2 No.2, 561. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.ID>
- Ashri, A. F. (2022). *Penyintas Gempa Cianjur Tuntut Kejelasan Relokasi*. Kompas. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/04/penyintas-gempa-cianjur-tuntut-kejelasan-relokasi?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login
- Langgar, D. (2023). Dinamika Interaksi, Potensi Konflik dan Keharmonisan Hubungan Antar Masyarakat Eks Timor-Timur dan Masyarakat Lokal di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang. *Gatra Nusantara*, Vol. 21 No.
- Ranupandojo, H., & Husnan, S. (2016). *Manajemen Personalialia* (4th ed.). BPFE Yogyakarta.
- Robbins, S. P. (2009). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Application (13th)*. Prentive-Hall.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.

- Samsiar, N. (2023). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*.
- Suarjana, I. G. P., Christiawan, P. I., & Nugraha, A. S. A. (2020). Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Agung Desa Ban. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v8i1.23475>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tjabolo, S. A. (2017). *Manajemen Konflik: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendekia.

